

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBERIAN PERMEN SEBAGAI ALTERNATIF UANG KEMBALIAN**

Syukran Haberlin, 24151044, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu  
Hukum, Universitas Dharma Andalas

### **ABSTRAK**

Praktik pemberian permen sebagai pengganti uang kembalian oleh pelaku usaha merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tindakan ini dianggap melanggar hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUPK, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, perlakuan yang jujur, tidak diskriminatif, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik tersebut serta menjelaskan tanggung jawab hukum pelaku usaha menurut peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus ini dapat ditempuh melalui pendekatan *preventif* (edukasi dan regulasi) serta *represif* (pengaduan ke BPSK, YLKI, atau melalui gugatan perdata/pidana). Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya sebatas etika bisnis, tetapi juga mencakup tanggung jawab perdata, administratif, bahkan pidana. Jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 UUPK. Selain itu, tindakan ini juga dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi keadilan hukum.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Permen, Uang Kembalian, Tanggung Jawab Pelaku Usaha*

**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN THE PRACTICE OF GIVING CANDY AS A  
SUBSTITUTE FOR CHANGE**

Syukran Haberlin, 24151044, Faculty of Law, Social and Humanities, Law Study Program,  
Universitas Dharma Andalas

**ABSTRACT**

*The practice of giving candy as a substitute for monetary change by business actors is an act that contradicts the principles of consumer protection as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). This practice violates consumer rights as outlined in Article 4 of the UUPK, particularly the rights to comfort, safety, accurate information, fair and non-discriminatory treatment and Law Number 7 of 2011 concerning Currency. This research aims to examine the legal protection available to consumers subjected to this practice and to describe the legal responsibilities of business actors under the prevailing laws and regulations. The study uses a normative legal method with a statutory approach. The findings show that legal protection for consumers in such cases can be pursued through two approaches: preventive (education and regulation) and repressive (complaints to the Consumer Dispute Settlement Agency [BPSK], Indonesian Consumers Foundation [YLKI], or through civil/criminal lawsuits). The responsibility of business actors extends beyond business ethics and includes civil, administrative, and even criminal liability. If the act causes actual harm to the consumer, the business actor is obligated to provide compensation as stipulated in Article 19 of the UUPK and may be subject to criminal sanctions under Article 62 of the UUPK. Furthermore, the act may fulfill the elements of fraud as defined in Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Therefore, collaboration among the government, business actors, and society is essential to create a consumer protection system that is fair, transparent, and upholds legal justice.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Candy, Change, Business Actor's Responsibility*